

ANALISIS PENERAPAN SAK-EMKM PADA PELAKU USAHA KECIL, DAN PELAKU USAHA MENENGAH

Kuntum Lathifatur R¹, Shelawati Ariningsih², Rita Wijayanti³

¹Faculty of Economics and Business, Universitas Muhammadiyah Surakarta

²Faculty of Economics and Business, Universitas Muhammadiyah Surakarta

³Faculty of Economics and Business, Universitas Muhammadiyah Surakarta

Informasi Naskah

Update Naskah:

Dikumpulkan: 21 Januari 2022;

Diterima: 12 January 2022;

Terbit/Dicetak: 28 Februari 2022.

Keywords:

SAK EMKM, UMKM, Financial Statement

Abstract

The purpose of this study is to determine the model for preparing the shop financial statements and to determine the knowledge and understanding of shop owners about SAK EMKM. This study uses a descriptive qualitative approach. To find out the application of SAK EMKM at the shop, the researcher used direct observation and interview techniques. The results of this study indicate that the Sularmi shop did not make financial reports at all and did not understand the application of SAK EMKM. This study only focuses on one sample of small businesses. The limitations of the research experienced were that the shop owners did not know about SAK EMKM at all. The possibility of contributing to the implementation of SAK EMKM has not been able to contribute because of the low understanding of SAK EMKM. However, we hope to provide assistance to improve understanding, knowledge, and skills of accounting practice as well as to analyze working capital needs in Sukoharjo Regency.

A. PENDAHULUAN

Menurut Warsadi dkk. (2017) cara yang efektif untuk menaikkan kesejahteraan penduduk ialah dengan berwirausaha, sebab berwirausaha bisa membentuk penduduk menjadi pribadi yang sangat mandiri dan juga akan menciptakan peluang atau kesempatan kerja guna mendapatkan laba bagi pemilik individu maupun bagi orang lain. Alasan dibentuk usaha guna meraih dan mendapatkan tujuan yang ingin diharapkan, meskipun tujuan yang ingin diraih tersebut sangat normal dan tidak ada perbedaan, namun mungkin prioritas atau kepentingan yang tidak sama.

Karena saat ini, perkembangan global pada bidang ekonomi telah mengalami kemajuan yang pesat dimana sudah muncul pengetahuan serta kreativitas manusia yang semakin tinggi dalam mencari laba atau kekayaan. Eksistensi pada Usaha Mikro, Kecil, serta Menengah (UMKM) telah benar-benar mampu dan terpercaya mencetak perkembangan yang sangat pesat dan bermanfaat pada perekonomian Indonesia, baik ketika normal maupun saat terjadi krisis ekonomi yang buruk seperti saat ini. UMKM juga mempunyai peluang yang bisa tumbuh dan berkembang dalam jumlah pendapatan usaha yang dihasilkan, serta membuka peluang bagi tenaga kerja manusia yang diperlukan atau diserap. Dalam menjalankan usaha operasionalnya, pemilik UMKM tentu sering merasa kesusahan dalam melakukan pencatatan pada operasional usahanya. Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman yang maksimal. Kesulitan tersebut dikarenakan berhubungan dengan kegiatan usahanya serta melakukan review ulang atas hasil yang telah dilakukan selama usaha tersebut dilakukan. Kennedy dan Emmanuel (2013) menegaskan bahwa Usaha Kecil dan Menengah (UKM) ikut berpartisipasi dengan memberikan lebih dari 90% dari produksi sektor swasta dan mereka merupakan sumber primer pekerjaan di negara-negara berkembang dan memainkan peranan penting dalam menghasilkan pendapatan terutama bagi masyarakat miskin. Tetapi sampai saat ini, tidak terdapat definisi yang jelas perihal UKM pada Nigeria.

Selain itu, Shonhadji dkk. (2017) juga menjelaskan jika uang masih dipergunakan menjadi alat tukar, otomatis akuntansi masih digunakan dan dibutuhkan. Berikut terdapat beberapa manfaat akuntansi yang bisa didapatkan bagi para pemilik UMKM, diantaranya: (1) pemilik bisa paham mengenai kinerja aktivitas keuangan dalam usahanya, (2) pemilik bisa mengerti, memilih, serta dapat mengetahui perbedaan antara harta operasional usaha dengan harta pribadi pemilik sendiri, (3) pemilik bisa mengerti dan memahami arah dana yang berasal dari sumber maupun pendanaannya dengan baik, (4) pemilik mampu menghasilkan aturan secara sempurna, (5) pemilik bisa mengerti bagaimana cara menghitung suatu pajak, serta (6) pemilik bisa memahami sirkulasi uang secara tunai dalam usahanya.

IAI (2016) menjelaskan bahwa “SAK ETAP merupakan standar akuntansi yang telah diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang bertujuan untuk dipergunakan oleh Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (EMKM), koperasi, dan berbagai perusahaan yang tidak memiliki akuntabilitas publik. Karena standar ini dianggap terlalu kompleks dan sulit bagi EMKM, oleh karena itu diperlukan standar akuntansi yang lebih sederhana dan bisa diaplikasikan bagi semua pelaku EMKM. Sehingga IAI membuat dan mengeluarkan standar baru yaitu SAK EMKM yang mulai diberlakukan semenjak 1 Januari 2018. Dimana standar ini lebih sederhana dan tidak kompleks seperti SAK-ETAP. Maka dari itu, pemerintah mengharapkan dengan adanya SAK EMKM ini, para pelaku EMKM bisa menyusun laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi yang lebih baik lagi dan juga lebih sederhana untuk memudahkan proses bisnis yang terjadi”.

Prawita dkk. (2021) menjelaskan bahwa laporan keuangan merupakan alat penyedia informasi keuangan, sehingga harus didasarkan pada standar tertentu atau khusus serta harus memiliki suatu pedoman khusus, agar semua informasi yang dilaporkan pada laporan keuangan bisa terjamin kebenarannya serta mampu dipertanggungjawabkan. Sehingga dapat dimanfaatkan bagi pemakai informasi laporan tersebut dan yang berkepentingan untuk dijadikan alasan dasar dalam pemikiran pada pembuatan maupun penentuan suatu keputusan finansial oleh pemilik usaha maupun pihak di luar usaha. Oleh karena itu, usaha yang semakin berkembang dan maju, maka UMKM dituntut untuk mempunyai laporan keuangan yang benar serta berdasarkan standar/aturan yang berlaku.

Suatu perusahaan memiliki laporan akuntansi dimana berisi catatan informasi finansial pada periode keuangan yang mendeskripsikan suatu proses kegiatan dalam perusahaan kecil maupun besar. Dimana laporan inilah yang berdasarkan SAK EMKM yang merupakan aturan dasar akuntansi mengenai laporan finansial yang sudah ditetapkan IAI dan telah dipergunakan bagi perusahaan hingga pada bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sekalipun. Standar akuntansi EMKM ini, yaitu aturan dasar akuntansi finansial yang lebih mudah dipahami dan diaplikasikan dibandingkan dengan standar akuntansi sebelumnya sebab berkaitan dengan transaksi umum yang telah dikerjakan oleh EMKM. Penerapan standar akuntansi yang baru ini, diharapkan bagi para pelaku UMKM atau pemilik usaha dapat mengaplikasikannya pada pembuatan laporan keuangan yang berkaitan dengan usahanya.

Dengan terbentuknya aturan dasar akuntansi yang baru yaitu SAK EMKM ini, para pelaku UMKM diharapkan tidak perlu lagi membuat/menyusun laporan keuangan yang bersumber dari IFRS maupun SAK ETAP. Sehingga bisa dikatakan bahwa standar akuntansi yang baru ini lebih mudah dipahami daripada SAK ETAP, tetapi tentu saja butuh pemahaman yang mumpuni. Saat ini masih banyak pelaku UMKM yang tidak memiliki kesadaran dalam melakukan praktik keuangan dikarenakan beberapa faktor. Padahal UMKM merupakan harapan untuk bisa menguasai pasar nasional bahkan internasional dimana mampu menyediakan produk yang berkualitas di pasar demi menambah perekonomian Negara dan mengurangi pengangguran yang semakin banyak seperti krisis saat ini. Sehingga keberadaan UMKM tidak dapat dihapuskan karena sangat bermanfaat bagi masyarakat. Dimana UMKM dapat menciptakan suatu kreativitas yang sesuai dengan usaha tersebut dalam pengembangan struktur-struktur tradisi dan kebudayaan penduduk sekitar. Saat era globalisasi seperti sekarang ini, pemilik usaha dituntut untuk meningkatkan produk dan jasa lewat inovasi yang berdaya kreatif tinggi sehingga mampu bersaing dengan produk lainnya.

Tujuan penelitian ini ialah guna mengetahui bentuk penyusunan laporan keuangan pada toko Sularmi. Tidak hanya itu saja, pada penelitian yang dibuat ini juga berusaha untuk mencari dan menemukan pemahaman dan pengetahuan pemilik yang berkaitan tentang SAK EMKM dan juga bagaimana pemilik membuat catatan laporan keuangan pada usahanya. Toko Sularmi telah menjalankan aktivitas operasionalnya sangat lama karena sudah beberapa tahun, namun karena keterbatasan pengetahuan mengenai bagaimana cara dalam mengelola finansialnya dan kurangnya SDM berkualitas atau yang mumpuni pada pembuatan laporan keuangan, hingga berakibat pada belum maksimalnya pemilik dalam mengelola usahanya secara benar serta sesuai dengan standar yang telah diterapkan. Maka dari itu, kinerja toko tersebut tidak memiliki kontrol yang baik. Penelitian ini akan memberi dampak yang baik bagi para pelaku usaha, pemerintah, maupun bagi para pendidik akademis sekalipun.

B. LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Standar Akuntansi Keuangan

Dalam penelitian terdahulu yang pernah diteliti oleh Uno dkk. (2019) menjelaskan bahwa akuntansi berisi bagan yang berkonsep secara struktural yang digunakan dalam basis penerapan metode-metodenya. Istilah tersebut dapat diartikan sama dengan konstitusi yang merupakan suatu bentuk yang konsisten yang terdiri atas maksud dan pikiran fundamental yang masing-masing terkait satu sama lain serta menjadi dasar bagi penentuan standar yang konstan dan penentuan hal lain seperti karakter, peran, dan limit dari akuntansi pada laporan keuangan. Dimana aturan dasar dan konsep akuntansi yang diterapkan di Indonesia dirangkap serta diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Dimana organisasi yang mengurus hal-hal yang berkaitan dengan profesi akuntan di Indonesia inilah yang dinamakan IAI.

Dalam penelitian tersebut juga telah dijelaskan bahwa SAK dibutuhkan untuk membuat laporan keuangan agar sama dengan yang lain dan tidak terjadi perbedaan antara bidang usaha. Dimana standar akuntansi ini mencakup beberapa hal seperti pada pembuatan laporan keuangan yang berupa standar/aturan pengukuran dan penerapan yang benar dan sesuai. Standar pengukuran disini merupakan aturan yang mengatur pengukuran pada tiap transaksi yang berjalan. Sedangkan standar pengungkapan disini mengurus sesuatu seperti apa dan bagaimana kejadian, transaksi, atau informasi keuangan tersebut bisa terjadi

sehingga perlu ditelusuri dengan jelas dan benar agar tidak memicu kesalahan yang sangat fatal yang bisa berakibat pihak yang berkepentingan atau bagi pengguna informasi laporan keuangan.

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM)

SAK-EMKM merupakan standar/aturan dasar yang dibentuk oleh IAI yang kemudian telah disetujui oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada 18 Mei 2016 yang dialokasikan untuk semua entitas tanpa akuntabilitas publik seperti diartikan dalam SAK ETAP dengan definisi dan patokan pada usaha dari mikro, kecil, hingga menengah seperti halnya telah dibentuk dalam peraturan perundang-undangan yang sudah diberlakukan di Indonesia. Standar akuntansi ini sudah resmi dilaksanakan pada 1 Januari 2018 (ED SAK EMKM, 2016). SAK EMKM ini berlandaskan sebagai berikut:

1. SAK EMKM ini dibuat untuk digunakan bagi pihak yang telah memenuhi kriteria sebagai pemilik usaha seperti telah masuk dalam kriteria usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah.
2. SAK EMKM ini dibuat guna diperuntukkan bagi pemilik usaha yang belum bisa masuk pada persyaratan kriteria dalam hubungannya dengan SAK ETAP.

Perbedaan SAK EMKM dan SAK ETAP

SAK ETAP disini merujuk pada standar/aturan dasar akuntansi yang diberlakukan sebelum dibentuknya SAK EMKM. Dimana pemilik usaha tanpa akuntabilitas publik didefinisikan dengan ketidakmampuan pemilik dalam pembuatan laporan keuangan yang benar dan berdasarkan aturan bagi pengguna luar. Sehingga pada saat itu, SAK EMKM sendiri berfungsi untuk diperuntukkan bagi perusahaan kecil serta menengah yang ditujukan untuk dijadikan dasar dalam pembuatan laporan akuntansi, sehingga juga dapat mempercepat dalam proses auditing. Oleh karena itu laporan keuangan yang dibentuk harus sesuai dengan standar/aturan dasar akuntansi yang baru sehingga dapat diperuntukkan oleh perusahaan agar dapat mengajukan bantuan biaya demi kemajuan usahanya. Selain itu, SAK EMKM juga lebih mudah diaplikasikan dikarenakan tidak kompleks dan sederhana dan masih dapat menyediakan informasi keuangan yang terpercaya dan akuntabel. Dimana SAK EMKM ini dibuat sederhana daripada SAK ETAP seperti:

1. Belum menyajikan laporan laba rugi yang komprehensif.
2. Hanya memerlukan data berupa harga perolehan dan tidak ada opsi penggunaan nilai wajar dalam perhitungan untuk aktiva tetap, aktiva tak berwujud, serta properti yang dibutuhkan dalam investasi setelah tanggal perolehan
3. Biaya pajak bisa dicatat sebesar jumlah pajak yang berdasarkan aturan pajak karena liabilitas dan aktiva pajak tangguhan tidak diakui atau dihilangkan.

Dalam penelitian terdahulu Uno dkk. (2019) menyebutkan bahwa dengan hadirnya pengesahan ED SAK EMKM, dapat dikatakan mampu menyempurnakan standar akuntansi keuangan di Indonesia yang terbentuk dengan tiga konsep standar akuntansi keuangan, yaitu yang berupa SAK umum yang berdasarkan IFRS, SAK ETAP, serta SAK EMKM. Ketiga pilar/konsep tersebut semuanya dapat memberi bantuan untuk pembangunan pada kerangka standar akuntansi keuangan atau dapat disebutkan bahwa telah mencerminkan dasar entitas usaha yang ada di Indonesia. Dimana SAK EMKM ini diperuntukkan guna melengkapi kebutuhan dalam pembuatan laporan keuangan bagi entitas mikro, entitas kecil, dan entitas menengah dengan dasar maupun aturan yang tentunya mudah dipahami dan dimengerti semisal diperbandingkan dengan SAK ETAP yang sebelumnya disahkannya untuk UMKM.

Pengertian UKM

Dalam penelitian terdahulu yang pernah diteliti oleh Ezeagba (2017) menjelaskan bahwa sebenarnya pengertian UKM sendiri tidak ada kesepakatan bersama yang mendefinisikan hal tersebut tentang pengertian pastinya dari Usaha Kecil dan Menengah (UKM) seperti apa, sehingga kecil maupun sedang adalah relatif dan tidak sama dengan usaha industri ke industri dan Negara ke Negara. Bukan hanya itu saja, karena sebenarnya belum adanya satu pengertian yang dapat mendefinisikan secara jelas perbedaan antara perusahaan, sektor dan Negara dikarenakan tingkat pemahaman yang berbeda didapatkan dalam penelitian.

Permasalahan Dalam UMKM

Menurut Salmiah & Siregar (2015) terdapat permasalahan yang ada dalam usaha kecil serta menengah yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

I. Faktor Internal

1. Masalah permodalan yang masih kurang dalam menggambarkan faktor dasar yang dibutuhkan guna memajukan suatu usaha. Sehingga karena tidak terdapatnya permodalan yang banyak, mengakibatkan kebanyakan usaha dari mikro hingga menengah hanya menggambarkan usaha perorangan atau perusahaan yang sifatnya privat.
2. Sumber daya manusia yang tidak mumpuni dan keterbatasan dalam usaha kecil dari berbagai aspek seperti pendidikan, pengetahuan, maupun keterampilan dapat begitu berdampak dengan alasan bahwa bagaimana pemilik usaha dapat mengelola usahanya dengan baik, sehingga usaha tersebut dapat disebutkan sulit untuk berkembang secara maksimal.
3. Lemahnya jejaring usaha serta daya penembusan usaha yang kecil. Jejaring usaha ini sangat kurang dalam hal kemampuan penembusan yang sedikit lebih kecil sehingga dapat menciptakan produk yang jumlahnya sangat terbatas karena memiliki kualitas produk yang tidak mampu bersaing.

II. Faktor Eksternal

1. Kondisi usaha yang sama sekali tidak mendukung kesesuaian dengan kebijakan Pemerintah guna menumbuhkembangkan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Dapat dipandang bahwa telah terjadi persaingan yang tidak benar antara pemilik usaha kecil dan besar.
2. Tidak memiliki sarana dan prasarana usaha serta sedikitnya informasi yang didapat yang berkaitan dalam pertumbuhan ilmu pengetahuan/wawasan dan teknologi dapat mengakibatkan sarana dan prasarana tersebut juga tidak bisa cepat untuk mengalami perkembangan signifikan serta kurangnya dalam membantu kesuksesan suatu usaha.

Pengertian Entitas Mikro Kecil Menengah

Definisi yang jelas dalam entitas mikro, kecil dan entitas menengah yaitu bersumber dari Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah dan UU RI No. 20 Tahun 2008. Pemakaian sebutan kata entitas ini menunjukkan pada pengertian bahwa entitas adalah satuan unit yang berbentuk dan memiliki kewajiban dalam pembuatan laporan keuangan. Sehingga SAK EMKM di dalamnya berpengaruh secara spesifik dalam mengurus hal yang saling terkait dalam pembuatan laporan keuangan EMKM yang sesuai pada SAK EMKM, yaitu “Entitas mikro, kecil, dan menengah ialah entitas tanpa akuntabilitas publik yang bermakna, sebagaimana diartikan dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), yang dapat memenuhi arti dan kriteria di dalam usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai halnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, setidaknya selama dua tahun berturut-turut.” Tidak hanya itu saja, karena hal ini juga didasarkan pada UU RI No. 20 Tahun 2008 pada BAB I Pasal 1, dimana definisi dari entitas mikro, entitas kecil, dan entitas menengah yaitu “Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang dipunyai orang perseorangan atau badan usaha perorangan yang dapat disebutkan bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang menjadi kepunyaan, dipengaruhi, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha yang memenuhi tolok ukur usaha kecil”.

Kriteria Entitas Mikro Kecil Menengah

Dalam penelitian Pertiwi dkk. (2020) juga menyebutkan bahwa kategori entitas mikro, entitas kecil, serta entitas menengah berlandaskan pada UU RI No. 20 Tahun 2008 BAB I Pasal 1, yaitu:

1. Tolok ukur entitas mikro yaitu mempunyai harta neto paling banyak Rp 50.000.000,00 dan di dalamnya tidak termasuk berupa tanah maupun gedung untuk usahanya atau mendapatkan hasil penjualan tahunan maksimal sebesar Rp 300.000.000,00.
2. Tolok ukur entitas kecil adalah mempunyai harta neto lebih dari Rp 50.000.000,00 sampai yang paling banyak sebesar Rp 500.000.000,00 dan di dalamnya tidak termasuk berupa tanah dan gedung

untuk usahanya atau mendapatkan hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 sampai maksimal sebesar Rp 2.500.000.000,00.

3. Tolok ukur entitas menengah adalah mempunyai harta neto lebih dari Rp 500.000.000,00 maksimal sampai Rp 10.000.000.000,00 dan di dalamnya tidak termasuk di dalamnya berupa tanah dan gedung untuk usahanya atau mendapatkan hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 maksimal sampai sebesar Rp 50.000.000.000,00.

Berdasarkan, Badan Pusat Statistik atau dapat disingkat menjadi BPS mendefinisikan kriteria EMKM berdasarkan jumlah tenaga kerja, yaitu:

1. Mempunyai minimal empat orang karyawan.
2. Mempunyai karyawan berjumlah lima sampai sembilan belas orang.
3. Mempunyai karyawan total sebanyak 20 sampai 99 orang.

Laporan Keuangan

Dalam penelitian terdahulu yang pernah diteliti oleh Widiastiawat & Hambali (2020) menyebutkan bahwa sistem informasi akuntansi memakai cara pengelompokan, pendataan, dan kesimpulan yang akhirnya akan terbentuk laporan keuangan. Dimana laporan tersebut akan menggambarkan kondisi suatu perusahaan. IAI memberikan penjelasan mengenai pengertian dari laporan keuangan yaitu berisi di dalamnya metode laporan keuangan secara umum atau biasanya terdapat neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, catatan dan laporan lain maupun materi yang berisi penjelasan yang menggambarkan komponen terstruktur dalam laporan keuangan.

Tujuan Umum Laporan Keuangan

Berdasarkan Syifana (2017) yang dimasukkan dalam penelitian Amilia dkk. (2019) menjelaskan bahwa tujuan laporan keuangan secara umum adalah:

- a. Dapat memberikan fasilitas mengenai informasi keuangan yang mampu dibenarkan yang berkaitan dengan aset, liabilitas, dan ekuitas pada perusahaan maupun entitas usaha.
- b. Menyediakan informasi yang berhubungan dengan keuangan yang dapat mempermudah para pengguna laporan keuangan guna memperkirakan keahlian yang dimiliki perusahaan maupun entitas usaha dalam mencetak laba/keuntungan.
- c. Menyediakan informasi yang benar-benar nyata dan ada yang berkaitan dengan perubahan yang terjadi dalam aset neto pada perusahaan yang terbit dari kegiatan usaha dalam hal mencetak laba/keuntungan.
- d. Menyediakan informasi yang berhubungan dengan perubahan pada aset dan liabilitas suatu perusahaan, dimana informasi yang berkaitan dengan kegiatan investasi dan kegiatan pembiayaan usaha.

Mengutarakan informasi yang berkaitan dengan laporan yang mengurus keuangan dengan relevan dan kredibel bagi pengguna laporan, dimana informasi yang berkaitan dengan ketentuan akuntansi dalam penerapannya pada perusahaan.

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan saat ini ialah menggunakan metode kualitatif deskriptif, yang bertujuan guna memahami secara keseluruhan fenomena yang terjadi dalam penelitian. Dimana berisi upaya untuk menjelaskan, membuat catatan, menganalisis serta mendeskripsikan secara jelas kondisi yang benar-benar terjadi, ada dan nyata. Domain dalam penelitian ini yaitu mengikuti penelitian terdahulu (Qimiyatissa'adah dkk., 2020) yaitu menggunakan pengetahuan/wawasan, serta penguasaan ilmu terhadap SAK EMKM. Dimana pengetahuan/wawasan yang ingin dianalisis dalam penelitian ini, dapat didefinisikan bahwa semua sumber informasi yang dapat diperoleh atau didapatkan oleh pemilik usaha tentang standar akuntansi yang telah diperoleh selama ini. Sedangkan pemahaman didefinisikan sebagai kemampuan para pelaku usaha dalam menerapkan apa yang diketahui yang berkaitan dengan SAK EMKM dalam penyusunan laporan keuangan.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan data primer. Dimana menurut (Nuvitasari dkk., 2019) data primer sendiri yaitu data yang didapatkan dengan cara interview atau wawancara tanya jawab dengan pemilik usaha toko Sularmi secara langsung dan tanpa perantara guna memberi informasi atau keterangan tentang permasalahan yang dapat menjelaskan atau mendeskripsikan suatu fenomena/gejala yang masuk akal yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya pada toko Sularmi terkait dalam permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti.

Informan dalam pemberian informasi ini yaitu pemilik usaha toko Sularmi. Objek penelitian yang menjadi contoh karena telah masuk dalam kategori usaha kecil terdapat di desa Jatirejo, Tiyaran, Bulu adalah toko Sularmi. Teknik analisis adalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan kerangka konsep seperti Miles dan Huberman yang berupa pengurangan informasi, penjabaran informasi, kemudian membuat kesimpulan. Dimana teknik ini mengadopsi dari penelitian sebelumnya yang termuat pada penelitian Lestari (2019)

1. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dengan cara peneliti datang langsung ke toko Sularmi dan kemudian melakukan tanya jawab, observasi, maupun membuat pendokumentasian.
2. Proses yang terjadi pada penelitian ini seperti pengurangan data yaitu peneliti hanya menggunakan satu pelaku usaha yang mewakili kriteria usaha mikro, kecil maupun menengah. Yang selanjutnya data tersebut dipilah lagi seperti mencari informasi yang benar-benar penting dan menghapuskan informasi yang tidak bermanfaat karena tidak digunakan.
3. Dalam menyajikan data, peneliti menggunakan informasi terpercaya yang sudah pasti digunakan yang kemudian akan dipaparkan dalam bentuk teks naratif atau deskriptif. Kemudian informasi ini akan dideskripsikan dalam bentuk satu paragraf dan selanjutnya akan dilakukan analisis.
4. Ringkasan yang didapat dalam penelitian ini terdapat pada data yang ada dan ditambah dari bukti pendukung kemungkinan dapat dijadikan alasan untuk memperkuat kesimpulan yang nantinya menjadi jawaban dari permasalahan di dalam penelitian.

D. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Ilustrasi

Ilustrasi kasus akan dijelaskan pada tabel berikut ini:

Toko Sularmi sudah berdiri selama 7 tahun lamanya. Latar belakang berdirinya UMKM ini adalah karena terdesak kebutuhan ekonomi, sehingga membuat toko yang kecil guna menyejahterakan diri sendiri tentunya. Toko ini menjual berbagai barang kebutuhan rumah tangga karena berharap dengan menjual produk tersebut akan cepat laku di masyarakat. Kisaran harga yang dijual pada toko tersebut yaitu Rp 500,00 sd Rp 20.000,00. Konsep penjualan dalam toko tersebut menerapkan pembayaran cash dan kasbon, dimana transaksi yang sering terjadi hanya pada penjualan saja dan total penghasilan yang didapat selama sehari kira-kira hanya Rp 50.000,00 dengan modal yang berasal dari milik sendiri atau pribadi sebesar Rp 500.000,00.

Toko Sularmi sama sekali tidak membuat pencatatan, dan hanya menghitung pendapatan yang didapat pada hari itu juga sebesar berapa dan kemudian disisakan lagi uang tersebut guna digunakan pembelian kebutuhan toko usahanya esok hari sebanyak berapa. Dari hasil proses tanya jawab yang dilakukan didapatkan hasil bahwa ternyata pemilik toko merasa usahanya ini tidak perlu melakukan pembuatan catatan keuangan, dikarenakan pendapatan atau penghasilan yang didapat juga kecil. Dikarenakan usaha toko ini masih terbilang kecil sehingga belum dapat berkembang pesat seperti pada usaha yang lain, oleh karena itu pemilik tidak memperhatikan laporan keuangan yang sesungguhnya bermanfaat dan berguna, sehingga keuntungan ataupun kerugian dapat ditaksir sendiri oleh pemilik dan belum adanya pembuatan catatan yang khusus. Tetapi sebenarnya pemilik toko Sularmi sudah tau mengenai laporan keuangan itu seperti apa dan bagaimana cara membuatnya, tetapi pemilik tidak melakukan pencatatan sama sekali. Hal tersebut disebabkan karena tidak adanya aturan terkait yang mengharuskan pembuatan laporan akuntansi bagi UMKM yang membuat para pemilik usaha untuk semakin mengabaikan hal tersebut.

Pemilik merasa belum siap untuk mengimplementasikan SAK EMKM karena tokonya sama sekali tidak membuat laporan keuangan, tidak mempunyai waktu atau kesempatan yang banyak guna membuat pencatatan, dan belum memiliki sumber daya manusia yang mumpuni untuk melakukan pembuatan laporan yang berhubungan dengan keuangan toko. Dan dalam hal pembukuan, pemilik sama sekali tidak melakukan pembukuan yang tepat berdasarkan standar akuntansi yang ada karena masih merasa terdapat keraguan bagi beliau. Tidak hanya itu saja, pemilik toko Sularmi juga berpikir bahwa usaha tokonya belum bisa melakukan pembuatan laporan keuangan yang sesuai standar dikarenakan usaha tokonya masih tidak memerlukan bantuan dana dari bank konvensional. Seperti yang diketahui bersama bahwa laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan yaitu salah satu persyaratan untuk disetujui dalam permohonan kredit. Sehingga dibutuhkan peran serta dari pemerintah terkait guna memberikan pelatihan maupun sosialisasi yang berhubungan dengan masalah pembuatan laporan keuangan dan memberi informasi tentang pemberlakuan SAK EMKM.

Sehingga jika tidak memiliki ilmu atau pengalaman tentang itu, maka pemilik usaha akan merasa kesulitan dalam melaksanakan standar yang berlaku pada saat ini. Hal tersebut dikarenakan tidak terdapatnya sosialisasi dari pemerintah daerah setempat, kemudian dari kalangan pendidik, dan akademisi terkait SAK EMKM. Tidak hanya disebabkan oleh itu saja, melainkan juga disebabkan oleh tingkat pendidikan yang masih rendah/sedikit, tidak terdapatnya kesadaran yang banyak dari masing-masing pemilik usaha, dan tidak mau untuk mencari tahu atau mengetahui informasi yang baru dan bermanfaat yang bisa memajukan usaha mereka juga menjadi alasan tidak pahamnya para pemilik usaha akan pemberlakuan SAK EMKM ini. Oleh karenanya, perlu kerja sama yang menguntungkan antar berbagai pihak.

Pembahasan

Hasil penelitian Lestari (2019) dalam penelitiannya “Kesiapan UMKM dalam Implementasi SAK EMKM Perajin Mebel Desa Catak Gayam, Mojowarno” dengan metode deskriptif kualitatif menunjukkan bahwa masih ada UMKM yang tidak melaksanakan dan mengimplementasikan SAK EMKM dikarenakan sama sekali belum pernah membuat laporan yang berhubungan dengan keuangan dengan benar, dan juga tidak mempunyai waktu untuk memulai membuat catatan akuntansi yang sesuai standar akuntansi, dan tidak memiliki SDM yang mampu dan cakap dalam pembuatan laporan keuangan.

Hasil penelitian Qimiyatussa’adah dkk. (2020) dalam penelitiannya “Pengetahuan dan Pemahaman Pelaku UMKM Atas Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM)” dengan metode survey menjelaskan bahwa tidak semua responden memahami dan menerapkan pembuatan laporan yang berhubungan dengan keuangan yang berlandaskan standar akuntansi tersebut sehingga hanya sebagian kecil dari responden yang sudah mampu memahami dan mengimplementasikan SAK EMKM dikarenakan belum pernah membuat hal tersebut sama sekali.

Hasil penelitian Rawun dkk. (2019) dalam penelitian “Penerapan Standar Akuntansi Keuangan EMKM dalam Penyusunan Laporan Keuangan pada UMKM (Suatu Studi UMKM Pesisir Di Kecamatan Malalayang Manado)” dengan metode deskriptif kualitatif membuktikan bahwa terdapat empat versi yang dapat diambil. Pertama, banyak para UMKM di Pesisir Pantai Malalayang yang belum menulis laporan keuangan secara *continue*. Kedua, ada UMKM yang tidak menyelenggarakan pencatatan selama usahanya berdiri sampai sekarang. Ketiga, terdapatnya UMKM yang hanya menyelenggarakan pencatatan hasil pada uang yang diperoleh dan mencadangkan uang yang lain guna dipergunakan untuk belanja di hari esoknya. Keempat, terdapatnya UMKM yang masih melakukan pencatatan total penjualan melalui nota, tetapi mereka hanya melakukan pencatatan pada total penjualan saja dan tidak menyusun laporan keuangan yang sesuai standar. Sehingga dapat ditarik kesimpulan jika konsep dalam pembuatan laporan keuangan pada UMKM di atas, tidak sesuai dengan standar yang berlaku saat ini.

Hasil penelitian Salmiah (2015) dalam penelitiannya “Penerapan Standar Akuntansi Keuangan EMKM Dalam Penyusunan Laporan Keuangan pada UMKM (Suatu Studi UMKM Pesisir Di Kecamatan Malalayang Manado)” menggunakan metode kualitatif deskriptif menggambarkan bahwa pelaksanaan

akuntansi pada UMKM tersebut masih sangat mudah dan tidak kompleks dan tidak mengikuti aturan dalam proses akuntansi sehingga kebanyakan belum mampu untuk mengimplementasikan dengan benar dan sesuai dengan standar yang berlaku (SAK EMKM).

Hasil penelitian Warsadi dkk (2017) dalam penelitian “Penerapan Penyusunan Laporan Keuangan Pada Usaha Kecil Menengah Berbasis Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah Pada PT. MAMA JAYA” dengan data primer, dimana didapatkan dengan melakukan wawancara tanya jawab dengan informan/pemilik usaha dan kemudian menggunakan data sekunder yang didapatkan melalui media lain seperti bertanya kepada orang lain selain pemilik usaha. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara tanya jawab dan dokumentasi. Dalam pencatatan akuntansi pada UKM tersebut ternyata belum terealisasi dan penerapan pencatatan keuangan yang diterapkan oleh UKM masih sangat sederhana dan mudah karena menggunakan metode manual.

Hasil penelitian Prawita dkk (2021) dalam penelitian “Analisis Penerapan SAK EMKM pada UMKM Toko Wildan di Desa Talang Kuning Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu” peneliti memperoleh data dari wawancara, observasi, dokumentasi maupun penelusuran data dan penulis juga menerapkan analisis kualitatif deskriptif. Sehingga hasil akhir dari penelitian ini yaitu UMKM tidak melakukan pembuatan laporan keuangan usahanya yang sesuai dengan standar akuntansi yang terbaru, hal ini dapat dibuktikan dengan hanya melakukan pencatatan laporan keuangan yang berhubungan dengan keuntungan atau kerugian saja dan juga hanya berfokus pada laporan posisi keuangan. Selain itu ada alasan yang mempengaruhi pemilik usaha untuk tidak membuat laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM yaitu hanya membuat pencatatan sesuai keinginan pemilik secara pribadi. UMKM ini hanya berpusat pada pemenuhan kebutuhan dan pemasukan pada usaha tanpa memperhitungkan hal-hal akuntansi yang didasarkan pada SAK EMKM.

Hasil penelitian Amilia dkk (2019) dalam penelitian “Analisis Penerapan Standar Akuntansi Dalam Laporan Keuangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah di Kabupaten Pasuruan” dengan metode kualitatif deskriptif dengan sampel yaitu UMKM yang berada di sektor makanan atau pembuatan makanan yang berada di Kabupaten Pasuruan yang kemudian ditentukan dengan menggunakan *random sampling*. Data sekunder yang diperoleh dalam penelitian disini yaitu berupa laporan keuangan pemilik usaha UMKM yang ada di Kabupaten Pasuruan. Dengan menggunakan pengumpulan data dalam bentuk buku, arsip, nomor tulisan maupun gambar dalam bentuk laporan serta informasi yang bisa membantu pada penelitian. Dokumentasi dan juga wawancara tanya jawab yang diterapkan pada penelitian ini mencakup laporan keuangan UMKM yang ada di Kabupaten Pasuruan. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa secara umum, penerapan pemilik usaha dalam pembuatan laporan keuangan termasuk tidak benar dan sesuai dalam berdasarkan SAK EMKM, karena masih didasarkan pada pengetahuan/wawasan pemilik dan juga kurangnya sosialisasi dari pihak yang terkait seperti pemerintah daerah menjadi masalah bagi UMKM saat pembuatan laporan keuangan.

Selaras dengan hasil semua penelitian terdahulu tersebut, karena toko Sularmi ini juga belum melaksanakan laporan keuangan yang benar dan sinkron dengan SAK EMKM. Oleh karena itu, pemilik usaha belum cakap dalam hal SAK EMKM yang saat ini telah berlangsung. Dimana pada istilah tersebut menggambarkan istilah yang aneh bagi para pelaku usaha. Sehingga pemilik tidak cakap dengan standar akuntansi yang berlaku dengan alasan bahwa sama sekali tidak menerima informasi atau sosialisasi tentang hal itu. Padahal pemilik juga sebenarnya telah memahami keuntungan yang akan didapatkan dari penyusunan laporan keuangan yang berlandaskan standar akuntansi, tetapi tidak mengimplementasikan dan menerapkan. Sehingga hasil dari penelitian ini, menggambarkan jika sampai sekarang ini masih terdapat UMKM yang belum pernah atau sama sekali memperoleh sosialisasi dan pemberian informasi mengenai SAK EMKM dari pemerintah daerah sekitarnya. Dimana Standar Akuntansi Keuangan EMKM ini, telah berlangsung pada Januari 2018, maka dari itu masih banyak para pemilik usaha yang tidak mengerti apa itu standar akuntansi yang benar dan sesuai.

E. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Bersumber dari hasil penelitian dan wawancara tanya jawab yang telah dilaksanakan mengenai analisis pengimplementasian SAK EMKM pada toko Sularmi, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pemilik sama sekali tidak melakukan pencatatan laporan keuangan maupun pembukuan karena beranggapan bahwa hanya toko kecil saja sehingga tidak memerlukannya padahal sebenarnya pemilik sudah paham mengenai laporan keuangan. Akan tetapi, pemilik sama sekali tidak paham mengenai SAK EMKM karena istilah tersebut terdengar asing bagi beliau karena minimnya sosialisasi atau pemberian informasi dari pemerintah daerah maupun dari para pendidik, dan akademisi merupakan salah satu kendala dalam pembuatan laporan keuangan yang tepat dan benar sesuai pada SAK EMKM yang berlaku sekarang ini.

Saran

1. Dalam penelitian ini hanya memilih satu sampel, dimana tentunya hasil penelitian ini belum mampu mengilustrasikan pengetahuan/wawasan dan pemahaman para pelaku usaha yang ada secara totalitas atau menyeluruh.
2. Penelitian ini juga hanya berfokus pada satu usaha kecil saja.
3. Dan juga pemilik sama sekali tidak ada keinginan untuk membuat laporan keuangan karena beranggapan itu tidak terlalu dibutuhkan dalam usahanya. Sehingga hanya ingin berfokus pada pemenuhan kebutuhan dan pemasukan sehingga tidak mempertimbangkan hal-hal akuntansi yang sesuai dengan SAK EMKM.

REFERENSI

- Ezeagba, C. (2017). Financial reporting in small and medium enterprises (SMEs) in Nigeria. Challenges and options. *International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences*, 7(1), 1-10.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2016). SAK Entitas Mikro Kecil dan Menengah. Jakarta: IAI
- Kennedy, P., & Emmanuel, E. (2013). Implications of IFRS adoption for SMEs in Nigeria. *Fountain Journal of Management and Social Sciences*, 2(1), 36-46.
- Lestari, E. P. (2019). Kesiapan UMKM Dalam Implementasi SAK EMKM Pengrajin Mebel DesaCatak Gayam, Mojowarno. *JAD: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Dewantara*, 2(1), 24-33.
- Nuvitasari, A., & Martiana, N. (2019). Implementasi SAK EMKM sebagai dasar penyusunan laporan keuangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). *International Journal of Social Science and Business*, 3(3), 341-347.
- Prawita, Y., Susanti, N., & Ferina, Z. I. (2021). Analysis of the Application of SAK EMKM on MSMEs at Wildan Shops in Talang Kuning Village, Teras Terunjam District, Mukomuko Regency, Bengkulu Province. *Journal of Indonesian Management (JIM)*, 1(2), 115-119.
- Qimyatussa'adah, Nugroho, S. W., & Hartono, H. R. P. (2020). Pengetahuan dan Pemahaman Pelaku UMKM Atas Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM). *Monex: Journal of Accounting Research-Politeknik Harapan Bersama Tegal*, 9(2), 146-151.
- Rawun, Y., & Tumilaar, O. N. (2019). Penerapan Standar Akuntansi Keuangan EMKM Dalam Penyusunan Laporan Keuangan pada UMKM (Suatu Studi UMKM Pesisir Di Kecamatan Malalayang Manado). *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 12(1), 57-66.
- Salmiah, N., & Siregar, I. F. (2015). Analisis Penerapan Akuntansi dan Kesesuaiannya dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (Pada UMKM di Kecamatan Sukajadi Binaan DisKop & UMKM Kota Pekanbaru). *Jurnal Akuntansi (Media Riset Akuntansi & Keuangan)*, 3(2), 212-226.
- Shonhadji, N., & Djuwito, D. (2017, October). Penerapan Penyusunan Laporan Keuangan Pada Usaha Kecil Menengah Berdasarkan Sak Emkm Di Surabaya. In *Seminar Nasional Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat* (Vol. 1, No. 1, pp. 130-136).
- Warsadi, K. A., Herawati, N. T., Ak, S. E., & Julianto, I. P. (2018). Penerapan penyusunan laporan keuangan pada usaha kecil menengah berbasis standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah pada PT. Mama Jaya. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 8(2).